

OMBUDSMAN RI TINJAU PELAYANAN PUBLIK DI DESA SALENRANG, MAROS

Kamis, 28 Agustus 2025 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

MAROS - Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, melakukan kunjungan ke Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Rabu (27/8/2025).

Kunjungan ini diawali dengan pertemuan bersama Camat Bontoa, Kepala Desa Salenrang, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengurus Koperasi Merah Putih Desa Salenrang di Dermaga I Rammang-Rammang.

Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi sekaligus mendengarkan aspirasi warga desa. Ia menekankan pentingnya desa memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola yang bebas dari praktik maladministrasi.

"Kami mendorong desa menjadi desa anti maladministrasi dan berkomitmen untuk menerapkan standar pelayanan minimum sebagaimana aturan yang berlaku. Implementasinya harus nyata dan berpihak kepada masyarakat," ujar Dadan.

Selain menyoroti pelayanan publik, Ombudsman RI berdiskusi terkait pengelolaan BUMDes serta visi kedepan pasca terbentuknya Koperasi Merah Putih yang disebut telah memiliki sekitar 2.000 anggota. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Ismu Iskandar menjelaskan bahwa kunjungan Ombudsman bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan publik di desa, khususnya terkait pengelolaan BUMDes dan koperasi desa. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan tugas Ombudsman dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan publik yang baik.

Koordinator Koperasi Merah Putih Desa Salenrang turut menyampaikan harapannya agar koperasi benar-benar bisa menjadi solusi bagi warga.

"Dengan adanya koperasi ini, semoga masyarakat bisa mendapatkan bantuan dana, misalnya ketika ada kapal yang perlu diperbaiki," ujarnya.

Kunjungan Ombudsman ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan bagi masyarakat.